



RENCANA AKSI TAHUN 2024



Kecamatan Balongbendo
Kabupaten Sidoarjo

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, telah dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja disusun sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo tahun 2021-2026 .

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Capaian Kinerja ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024.

Sidoarjo, 26 Januari 2024

CAMAT BALONGBENDO



ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19790114 199711 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. SISTEMATIKA PENULISAN	2
BAB II RENCANA AKSI	3
A. PERJANJIAN KINERJA	3
B. RENCANA AKSI	4
BAB III PENUTUP	18
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengawasan, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah **menyusun Rencana Aksi Capaian Kinerja sebagai tindaklanjut dari ditetapkannya dokumen Perjanjian Kinerja**. Rencana aksi pencapaian kinerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2024.

B Aspek Strategis Organisasi

Adapun maksud penyusunan laporan rencana aksi adalah tersusunnya laporan rencana aksi atas capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dan tujuan disusunnya laporan rencana aksi yaitu :

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2024 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2024;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

C SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan rencana aksi capaian kinerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 menggunakan sistematika penulisan laporan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan, serta sistematika laporan.

Bab II Rencana Aksi

Menyajikan perjanjian kinerja dan rencana aksi tahun 2024.

Bab III Penutup

Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan rencana aksi.

BAB II

RENCANA AKSI

A PERJANJIAN KINERJA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Pejabat Eselon II dan Kepala Unit Operasional wajib menyampaikan Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja (PK) ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi dan penilaian kinerja.

Dengan Perjanjian Kinerja (PK), diharapkan para pimpinan instansi harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian Kinerja (PK) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon III, meskipun demikian, Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo adalah Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor

Tahun 2016 sehingga wajib untuk menyampaikan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan - kegiatan yang telah dirancang pada tahun berkenaan.

Setiap akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJI). Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

B RENCANA AKSI

Rencana Aksi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 yang *dibreakdown* per triwulan. Adapun Rencana Aksi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2. 1

**TARGET RENCANA AKSI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	A (81,00) Nilai	-	-	-	V
		Nilai IPP	A- (4,30) Nilai	-	-	-	V
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase permasalahan Trantibum yang diselesaikan	100 %	V	V	V	V

Tabel 2.2
RENCANA AKSI
KECAMATAN BALONGBENDO KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2024

Tujuan	Sasaran PD	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja					Pagu Anggaran (Rp)					Penanggung jawab
				1 Tahun	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraa n Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Balongbendo	89,00	-	-	-	89,00	5.288.655. 997	1.715.160. 297	1.461.890. .400	1.141.267. 751	970.337. 549	Camat
			Nilai SAKIP Kecamatan Balongbendo	A (81,00) Nilai	-	-	-	A (81,00) Nilai						Camat
	Meningkatn ya kualitas penyelengg araan Pemerintah an Kecamatan Balongbend o		Nilai IPP	4,30 Nilai	-	-	-	4,30 Nilai						Camat

	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban umum		Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	87.631.200	45.750.000	17.381.200	14.062.500	10.437.500	Camat
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	91,50 %	-	-	-	91,50 %	4.816.007.297	1.474.255.297	1.339.921.700	1.065.867.751	935.962.549	Camat
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	87 %	-	-	-	87 %	3.296.670.134	932.669.350	1.040.623.600	826.462.700	496.914.484	Sekretaris Kecamatan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.296.670.134	932.669.350	1.040.623.600	826.462.700	496.914.484	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan				
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	500.000	500.000	0	0	0	Sekretaris Kecamatan
			Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %						Sekretaris Kecamatan
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	39 Orang	39 Orang	-	-	-	500.000	500.000	0	0	0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

			Perundang-Undangan											
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	98,13 Nilai	-	-	-	98,13 Nilai	274.387.501	128.937.100	77.070.000	62.070.000	6.310.401	Sekretaris Kecamatan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	6.888.660	6.888.660	0	0	0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	17.980.448	17.980.448	0	0	0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	103.673.701	33.000.000	33.000.000	33.000.000	4.673.701	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	3.166.700	900.000	900.000	900.000	466.700	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	4.680.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

		Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan											
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-	7.010.760	7.010.760	0	0	0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	130.987.232	61.987.232	42.000.000	27.000.000	0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 %	731.392.665	159.187.800	205.548.100	167.519.101	199.137.664	Sekretaris Kecamatan				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	139.080.265	51.702.400	51.000.000	25.971.001	10.406.864	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	592.312.400	107.485.400	154.548.100	141.548.100	188.730.800	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang	100 %	513.056.997	252.961.047	16.680.000	9.815.950	233.600.000	Sekretaris Kecamatan				

		Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi											
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	30.315.950	18.500.000	7.500.000	4.315.950	0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	28.461.047	28.461.047	0	0	0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	20.000.000	6.000.000	8.500.000	5.500.000	0	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	-	-	434.280.000	200.000.000	680.000	0	233.600.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	284.792.500	182.092.500	87.025.000	10.925.000	4.750.000	Camat
			Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %						Camat
				Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup;	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	274.792.500	179.217.500	84.650.000	8.550.000	2.375.000	Sekretaris Kecamatan

			pemerintahan dan perekonomian yang disusun											
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	16 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	274.792.500	179.217.500	84.650.000	8.550.000	2.375.000	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Seksi Pemerintahan • Kepala Seksi Perekonomian • Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial • Kepala Seksi Pembangunan
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti	4900 Berkas	1225 Berkas	1225 Berkas	1225 Berkas	1225 Berkas	5.250.000	1.687.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	Sekretaris Kecamatan
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	5.250.000	1.687.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

			Wilayah Kecamatan													
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup ; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.750.000	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	0	Sekretaris Kecamatan	
			Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan								Sekretaris Kecamatan
			Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan	0 Berkas	0 Berkas	0 Berkas	0 Berkas	0 Berkas								
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	14 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	4.750.000	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	0	Kepala Seksi Perekonomian	

		Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100 %	87.631.200	45.750.000	17.381.200	14.062.500	10.437.500	Camat				
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	2 Laporan	84.756.200	45.750.000	17.381.200	11.187.500	10.437.500	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	52.125.000	31.687.500	1.187.500	10.000.000	9.250.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	32.631.200	14.062.500	16.193.700	1.187.500	1.187.500	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial

			Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat											
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	4 Permasalahan	1 Permasalahan	1 Permasalahan	1 Permasalahan	1 Permasalahan	2.875.000	0	0	2.875.000	0	Sekretaris Kecamatan
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2.875.000	0	0	2.875.000	0	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100 %	89.725.000	9.000.000	13.500.000	49.225.000	18.000.000	Camat				

		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	89.725.00 0	9.000.000	13.500.00 0	49.225.00 0	18.000.0 00	Sekretaris Kecamatan
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	200 Orang	-	-	200 Orang	-	35.725.00 0	0	0	35.725.000	0	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

			Kesatuan Republik Indonesia											
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	54.000.000	9.000.000	13.500.000	13.500.000	18.000.000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100 %	10.500.000	4.062.500	4.062.500	1.187.500	1.187.500	Camat				
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	20 Desa	10.500.000	4.062.500	4.062.500	1.187.500	1.187.500	Sekretaris Kecamatan				
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.750.000	1.187.500	1.187.500	1.187.500	1.187.500	Kepala Seksi Pemerintahan

			Administrasi Tata Pemerintahan Desa											
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	5.750.000	2.875.000	2.875.000	0	0	Kepala Seksi Pemerintahan

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja OPD merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan subkegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah- langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan/faktor Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari OPD Kecamatan Balongbendo berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.